

**PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, PENGENDALIAN INTERN DAN
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP
KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA
SKPYANG TERDAPAT DI KOTA PADANG)**

ARTIKEL ILMIAH

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S1) Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

IKHWAN SUKRI

NIM/BP. 12966/2009

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017**

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL
PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, PENGENDALIAN INTERN DAN
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP
KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Kasus Pada SKPD yang Terdapat di Kota Padang)

Oleh :

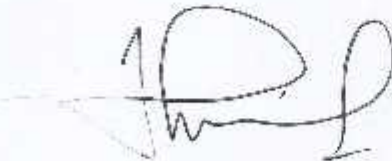
Ikhwan Sukri
12966/2009

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode ke 108
25 dan 26 maret 2017 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, Februari 2017

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Henri Agustin, SE, M.Sc. Ak
NIP. 19771123 200 312 1 003

Pembimbing II



Erly Mulvani, SE, M.Si. Ak
NIP. 19781204 200801 2 011

Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
(Studi Empiris pada SKPD di kota Padang)

Ikhwan Sukri

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh sumber daya manusia, pengendalian intern dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD kota Padang. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Jenis dan sumber data adalah data primer. Analisis data dengan menggunakan regresi berganda dengan uji F dan uji T. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (2) Pengendalian intern dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Kata kunci: Sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Abstract

This study aims to identify and test the effect of human resources, internal controls and utilization of accounting information system of the timeliness of financial reporting. This research is classified research causative. The population in this study were all SKPD in city of Padang. Methods of data collection using questionnaires. The types and sources of data are primary data. Analysis of data using multiple regression with F test and T. The results showed (1) Human resources do not affect the timeliness of financial reporting (2) Internal controls and accounting information system utilization positive significant effect on the timeliness of financial reporting.

Keywords: Human resources, internal control, accounting information system utilization and timeliness of financial reporting

1. PENDAHULUAN

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006:5). Pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik yang diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu sesuai dengan peraturan pemerintah no 71 tahun 2010. Ketepatan waktu (timeliness) merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Karakteristik informasi yang relevan harus mempunyai nilai prediktif dan disajikan tepat waktu. Ketepatan waktu adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah yang dimaksud diantaranya adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah (PP No 71 tahun 2010).

Indikator ketepatanwaktuan Laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia di atur dalam PP no 71 tahun 2010 dimana laporan keuangan pemerintah daerah harus

diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau tanggal 31 maret. Pemerintah daerah yang tidak tepat waktu dalam penyerahan LKPD tersebut berimplikasi pada mundurnya pemeriksaan yang dilakukan BPK. Padahal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK ini semestinya dijadikan acuan pada saat Pemda melakukan Perubahan APBD/APBD-P (Anggaran Belanja Tambahan=ABT) diantaranya terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) setelah diaudit BPK ataupun hasil audit yang kemungkinan mengakibatkan perlu adanya pergeseran anggaran ataupun bahkan perkembangan yang terjadi sudah tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA). Sedangkan Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa. Keterlambatan pengesahan Perubahan APBD menjadikan penyerapan anggaran akhirnya menjadi rendah/dibawah target atau dengan kata lain banyak kegiatan dikhawatirkan tidak dapat selesai 100%. Oleh karena itu, ketepatan waktu adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan.

Dengan adanya batas waktu penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK RI menyebabkan pemerintah daerah harus memaksimalkan kinerja setiap aspek yang ada di lembaganya, jika pemerintah daerah tidak mampu memaksimalkan hal tersebut dapat mempengaruhi opini yang akan dikeluarkan oleh BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi ketepatanwaktuan dalam penyerahan laporan keuangan LKPD adalah sumber daya manusia yang bertanggungjawab dalam melaksanakan teknis akuntansi. Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting*

treatment), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada.

Faktor yang kedua yang mungkin mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pengendalian internal akuntansi. Sistem Pengendalian Intern dalam akuntansi memiliki peranan penting karena sistem pengendalian intern merupakan prosedur atau sistem yang dirancang untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan organisasi agar dapat mencapai suatu tujuan. Sistem tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengendalikan proses akuntansi pemerintah daerah dan dapat disimpulkan dengan adanya pengendalian yang dapat mengawasi dan mengendalikan proses akuntansi pemerintah daerah dapat meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.. Pengendalian intern menurut permendagri No.60 Tahun 2008 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhi perundang-undangan.

Faktor ketiga yang mungkin mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kualitas semakin rumit dan kompleks.

Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan

kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi Keuangan Daerah kepada Publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya teknologi informasi yang dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah seharusnya pemerintah daerah dapat menyiapkan laporan keuangan tepat waktu .

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah pada sistem akuntansi pemerintah daerah, dimana penelitian terdahulu mengenai pengaruh sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi dan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu LKPD yang masih menggunakan sistem akuntansi kas menuju akrual. Berdasarkan PP No 71 tahun 2010 sistem keuangan pemerintah pusat dan daerah setelah tanggal 1 januari 2015 sudah harus menerapkan standar akuntansi berbasis akrual. Dengan adanya sistem akuntansi berbasis akrual yang mengharuskan pencatatan transaksi akuntansi pada saat periode transaksi dilakukan maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih meningkatkan ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan dan peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi dan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu LKPD yang sudah berbasis akrual.

Fenomena yang muncul terkait pelaporan keuangan pemerintah daerah (SKPD) di pemerintah kota Padang adalah masih banyaknya SKPD yang belum menyelesaikan laporan keuangan pada bulan februari 2016 dimana batas akhir penyerahan LKPD kepada BPK adalah maret 2016 yang dapat meningkatkan tertundanya pencairan anggaran untuk tahun 2016. Hal tersebut diungkapkan oleh perwakilan komisi 2 bidang ekonomi

DPRD Kota Padang (Padangmedia.com diakses pada 13 oktober 2016). Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kota Padang tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah Kota Padang belum sepenuhnya memenuhi kriteria nilai informasi ketepatanwaktuan meskipun kota padang memperoleh opini WTP pada tahun 2014 dan 2015. Mengingat laporan keuangan merupakan nilai informasi yang berguna bagi pengguna untuk pengambilan keputusan maka ketepatanwaktuan pengungkapan merupakan satu hal yang sangat penting diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena dan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD yang Terdapat di Kota Padang)”**.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti ini adalah:

1. Sejauhmana sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan?
2. Sejauhmana pengendalian intern berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan?
3. Sejauhmana pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini digunakan untuk mengetahui:

1. Pengaruh sumber daya manusia terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.
2. Pengaruh pengendalian intern terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

3. Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk banyak pihak, seperti:

1. Bagi penulis
Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan system informasi akuntansi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.
2. Bagi pihak yang diteliti
Penelitian ini dapat dijadikan masukan dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi dalam aktivitas organisasi.
3. Bagi Penulis selanjutnya
Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

2. TELAAH LITERATUR

Teori *Agency*

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah oranglain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal serta member wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Mengacu pada teori agensi (*agency theory*), akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Haryanto dkk, 2007).

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu social khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku

kepatuhan seorang individu. Menurut Tyler dalam Rachmad Saleh 2001 terdapat dua perspektif dasar dalam literature sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam *tangible*, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah (pp) No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan merupakan laporan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan daerah selama suatu periode.

Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Ketepatan waktu informasi akuntansi menurut SFAC No. 2 mengenai karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang juga terdapat dalam Hendriksen dan Breda (1992:136) harus tersedia bagi pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi tetapi tidaklah mungkin tanpa ketepatan waktu. Oleh karena itu ketepatan waktu adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan. Akumulasi, peringkasan, dan penyajian selanjutnya informasi akuntansi harus

dilakukan secepat mungkin untuk menjamin tersedia informasi ditangan pemakai atau pengguna.

Ketepatan waktu menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang pada gilirannya mungkin akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai. Ketepatan waktu juga menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Informasi yang tepat waktu dipengaruhi kemampuan manajer dalam merespon setiap kejadian atau permasalahan. Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan. Informasi tepat waktu juga akan mendukung manajer menghadapi ketidakpastian yang terjadi dalam lingkungan kerja mereka (Amey; Gordon dan Narayanan) dalam Respati (2001).

Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi atau kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Hullah *et al* (2012) menjelaskan bahwa sumber daya manusia adalah orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan organisasional. Ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah dapat tercapai apabila sumber daya manusianya berkualitas dan kualitas tersebut diukur dari kemampuan pengetahuannya (*knowledge*) (Susilo, 2002 dalam Aritonang *et al* 2009), terutama untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid.

Pengendalian Intern

Berdasarkan PP No. 60/2008 Pasal 1 (1) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan

yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan sistem Informasi Akuntansi

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam peraturan pemerintah No 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No 11 tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Teknologi Informasi (TI) meliputi segala alat maupun metode yang terintegrasi untuk digunakan dalam menjangkau atau menangkap data (*capture*), menyimpan (*saving*), mengolah (*process*), mengirim (*distribute*), atau menyajikan kebutuhan informasi secara elektronik ke dalam berbagai format, yang bermanfaat bagi *user* (pemakai informasi). Teknologi ini dapat berupa kombinasi perangkat keras dan lunak dari komputer, non komputer (*manual*) maupun prosedur, operator, dan para manajer dalam suatu sistem yang terpadu satu sama lain.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Widyaningrum (2010) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sumber daya manusia tidak memiliki

pengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kerangka Konseptual

Sumber daya manusia pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan dibidang akuntansi. Disini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai dan tepat waktu. Informasi yang bernilai akan memicu pemerintah yang bersangkutan tidak ragu untuk segera menyajikan dan mempublikasikan laporan keuangannya dengan tepat waktu.

Pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi salah satu nilai informasi yang disyaratkan yaitu ketepatanwaktuan.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Masih adanya penyimpangan dan penyalahgunaan aturan dalam menjalankan Sistem Pengendalian Intern didalam laporan keuangan oleh BPK menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik nilai informasi yang disyaratkan.

Pengendalian intern yang lemah menyebabkan tidak dapat terdeteksinya kecurangan atau ketidak-akuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang

diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi nilai informasi yang disyaratkan yaitu ketepatanwaktu. Ketidak-tepatan penyajian laporan keuangan juga berkaitan dengan kurang ditaatinya pengendalian internal yang diterapkan.

Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis membuat kerangka konseptual untuk dapat menjelaskan, mengungkapkan, menunjukkan keterkaitan antara variable X (Kualitas SDM, Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi) dan variable Y (Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan).

3.METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka jenis penelitian ini dikelompokkan pada penelitian kausatif.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD di kota Padang dimana terdapat 48 SKPD di kota Padang.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data subjek. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner disebarkan langsung ke responden, demikian pula pengembaliannya dijemput sendiri sesuai dengan janji pada kantor instansi pemerintah tersebut. Responden diharapkan mengembalikan kembali kuesioner pada peneliti dalam waktu yang telah ditentukan.

Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor yaitu: Sangat

Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam rangka mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Variabel yang diukur dalam kuesioner: kualitas sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan ketepatanwaktu pelaporan keuangan.

Uji Validitas dan Reliabilitas

1.Uji Validitas

Uji validitas menggambarkan bahwa pernyataan yang digunakan mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur valid. Untuk uji validitas ini menggunakan pengukuran SPSS 21 yang dapat dilihat dari *Corrected item-total Correlation*, jika nilainya negatif atau kecil dari r tabel, maka nomor item tersebut tidak valid dan sebaliknya.

2.Uji Reliabilitas

Uji realibilitas adalah untuk mengukur bahwa instrumen yang digunakan bebas dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat digunakan dengan aman karena instrumen yang reliabel akan akurat, dapat bekerja dengan baik pada waktu yang berbeda-beda dan dalam kondisi yang berbeda beda pula. Uji realibilitas dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar suatu pengukuran mengukur dengan stabil atau konsisten. Instrumen dipercaya jika jawaban dari responden atas pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk uji reliabilitas jika nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60 maka instrumen dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk melihat kelayakan model serta untuk melihat apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik dalam model regresi berganda. Terdapat tiga asumsi dasar yang harus dipenuhi oleh model regresi agar parameter estimasi tidak bias, yaitu:

1. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas merupakan uji asumsi paling dasar dalam analisis *multivariat* mengenai bentuk pendistribusian data untuk variabel tunggal dan penyesuaiannya terhadap distribusi normal. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi dianggap baik jika keduanya memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian ini menggunakan metode *kolmogorov smirnov* dengan kriteria pengujian $\alpha = 0,05$. Jika sig berarti data sampel berdistribusi normal, jika sebaliknya maka data tidak berdistribusi normal.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan kepengamatan lainnya. Jika varians dari residual suatu pengamatan kepengamatan lainnya tetap maka disebut homokedastisitas. Suatu model regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi heterokedastisitas/terjadinya homokedastisitas. Jika profitabilitas diatas 5% dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas

3. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat di antara variabel-variabel independen yang diikutsertakan dalam pembentukan model. Untuk mendeteksi apakah model regresi linier mengalami multikolonieritas dapat diperiksa menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk masing-masing variabel independen, yaitu jika suatu variabel independen mempunyai nilai $VIF > 10$ berarti telah terjadi multikolonieritas. Untuk mendapatkan nilai VIF untuk masing-masing variabel independen

Uji Model

1. Uji F (F- test)

Uji *F*-statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Setelah *F* garis regresi ditemukan hasilnya, kemudian dibandingkan dengan F_{tabel} . Untuk menentukan nilai F_{tabel} , tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar $\alpha = 5\%$ dengan derajat tkebebasan (*degree of freedom*). Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ maka variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara bersama-sama. Sebaliknya jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ maka, variabel bebas secara bersama-sama tidak mampu menjelaskan variabel terikatnya.

2. *Adjusted R Square* (koefisien determinasi)

Untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari *adjusted R square*-nya, pemilihan nilai *adjusted R square* karena penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan jumlah variabel lebih dari satu. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. *Adjusted R²* berarti R^2 sudah disesuaikan dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kua

drat yang tercakup di dalam perhitungan *Adjusted R²*. Untuk membandingkan dua R^2 , maka harus memperhitungkan banyaknya variabel *X* yang ada dalam model

3. Uji Hipotesis (t-test)

Uji *t*-statistik bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan, dengan asumsi bahwa jika signifikan nilai *t* hitung yang dapat dilihat dari analisa regresi menunjukkan kecil dari $\alpha = 5\%$, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Definisi Operasional

Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan batasan penting pada publikasi laporan keuangan. Akumulasi,

peringkasan, dan penyajian selanjutnya informasi akuntansi harus dilakukan secepat mungkin untuk menjamin tersedia informasi ditangan pemakai atau pengguna.

Sumber Daya Manusia

Merupakan kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi atau kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Pengendalian Intern

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

Pemanfaatan system informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh penggunaan sistem informasi dalam melaksanakan tugas, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dan diversitas aplikasi yang dijalankan

4.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Residual

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji dalam sebuah model regresi, variabel eksogen dan endogen terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *one sample kolmogrov-smirnov test*, yang mana jika nilai asymp. Sig (2-tailed) = 0,05 maka distribusi data dapat dikatakan normal. Hasil pengolahan SPSS 16 didapat bahwa nilai masing-masing variabel nilai *kolmogrov smirnov* > 0,05, yaitu 0,769. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data berdistribusi secara normal.

2. Uji Heterokedastisitas

Dalam uji ini hasil $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas, model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisits. Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari masing-masing menunjukkan level $\text{sig} >$, yaitu 0,692 untuk variabel sumber daya manusia, 0,077 untuk variabel pengendalian internal dan 0,591 untuk variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi, ini berarti penelitian ini bebas dari heterokedastisitas dan layak untuk diteliti.

3. Uji Multikolinearitas

Uji menguji adanya multikolonearitas dapat dilihat melalui *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 *tolerance* > 0,1. Dari hasil pengujian nilai *tolerance* untuk variabel sumber daya manusia (X_1) sebesar 0,608 dengan nilai VIF sebesar 1,644. Untuk variabel pengendalian internal (X_2) mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,586 dengan nilai VIF sebesar 1,706. Untuk variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi (X_3) mempunyai nilai *tolerance* 0,616 dengan nilai VIF sebesar 1,622. Masing-masing variabel independen tersebut memiliki angka *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolonieritas antar variabel independen.

Hasil Penelitian

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel terikat. Koefisien determinasi menunjukkan proporsi yang diterangkan oleh variabel independen dalam mode variabel terikat, sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Berdasarkan hasil penelitian Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 36,6%. Dan sisanya sebesar 63,4% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Berganda

Hasil pengujian analisis linear bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil pengolahan data statistik menunjukkan persamaan regresi linear berganda, yaitu :

$$Y = 3,357 + 0,005 X_1 + 0,062 X_2 + 0,169 X_3$$

Uji F statistik

Hasil pengolahan data pada tabel 6 menunjukkan F_{hitung} yaitu sebesar 25,07 dan nilai sig. $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau model yang digunakan sudah fix.

Uji t (hipotesis)

Berdasarkan hasil olahan data statistik dapat dilihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, yaitu :

- Sumber daya manusia memiliki nilai sig. $0,856 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **hipotesis 1 Ditolak**.
- Pengendalian intern memiliki nilai sig. $0,008 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini berarti bahwa H_2 **diterima**.
- Pemanfaatan sistem informasi akuntansi memiliki nilai sig. $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **hipotesis 3 diterima**.

Pembahasan

1. Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian

tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Winidyaningrum (2010) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aritonang dan Syarif (2009) yang menemukan bahwa sumber daya manusia dan perangkat pendukung tidak signifikan mempengaruhi keberhasilan laporan keuangan disampaikan tepat waktu.

Tidak berpengaruhnya sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat disebabkan oleh rendahnya pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsinya serta hambatan di dalam pengolahan data juga dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian. Walaupun sistem akuntansi yang sudah dibangun dengan baik, tetapi jika sumber dayanya tidak memiliki kapasitas dan jumlah sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakannya akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi sehingga nantinya informasi akuntansi sebagai hasil dari sistem akuntansi tidak dapat disampaikan secara tepat waktu.

Oleh karena itu untuk meningkatkan kemampuannya seorang staf pelaporan keuangan harus ikut serta dalam pelatihan-pelatihan tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan demi meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Semakin besar pendidikan, pengalaman, dan keahlian seorang staf maka staf tersebut dapat menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya dengan baik dan lebih cepat.

2. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Menurut Hipotesis kedua penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap

ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Putrining (2014) yang menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah.

Primastuti (2008) yang menyatakan, bahwa sesungguhnya yang paling berkepentingan terhadap sistem pengendalian intern suatu entitas organisasi/perusahaan adalah manajemen (lebih tegasnya lagi ialah *top management/direksi*), karena dengan sistem pengendalian intern yang baik itulah *top management* dapat mengharapkan kebijakannya dipatuhi, aktiva atau harta perusahaan dilindungi, dan penyelenggaraan pencatatan berjalan baik. *Top management* bertanggung jawab menyusun sistem pengendalian intern, tentu saja dilaksanakan oleh para stafnya. Dalam penyusunan team yang akan ditugaskan untuk merancang sistem pengendalian intern, harus dipilih anggotanya dari para ahli/kompeten, termasuk yang berkaitan dengan Teknologi Informasi. Sistem pengendalian intern harus selalu dan terus-menerus dievaluasi, diperbaiki, disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan teknologi informasi.

Kinerja dari sebuah sistem informasi akan semakin mendukung aspek kecepatan dan ketepatan apabila sistem pengendalian intern juga berjalan dengan baik. Karena ketepatan waktu menjadi hal yang sangat penting maka hendaknya sistem pengendalian intern mampu mempunyai sifat preventif terhadap kesalahan, detektif terhadap kesalahan dan melakukan koreksi terhadap kesalahan yang terjadi. Sehingga apabila sistem pengendalian intern meningkat diharapkan aspek ketepatan waktu pelaporan keuangan juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah berkaitan dengan sistem

pengendalian intern pemerintahan. Menurut PP 60/2008, salah satu komponen pengendalian intern dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) adalah komunikasi dan informasi. Pimpinan instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

3. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan juga akan semakin meningkat.

Hal ini sejalan dengan penelitian Winidyaningrum (2010) bahwa sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian di atas konsisten dengan teori yang dinyatakan oleh Jogiyanto (2007) informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (ketepatan waktu) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Menurut Jogiyanto (2007) informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif.

Dilihat dari data distribusi frekuensi untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi di mana tingkat capaian responden rata-rata untuk variabel tersebut berada pada kategori baik sehingga pemanfaatan teknologi informasi dengan semakin baik, maka akan membantu pegawai untuk mencapai ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang semakin meningkat. Dengan mengetahui pemanfaatan teknologi informasi tingkat ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang semakin baik, keterlibatan individu dalam pemanfaatan teknologi akan memahami sasaran yang akan dicapai oleh laporan keuangan tersebut, serta bagaimana akan mencapainya dengan menggunakan sumber yang ada, selanjutnya target-target laporan keuangan yang disusun akan sesuai.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu organisasi sektor publik (SKPD) akan meningkatkan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah menjadi baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

5.PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan di pemerintah kota Padang.
2. Pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan di pemerintah kota Padang.
3. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatanwaktuan

pelaporan keuangan di pemerintah kota Padang.

Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa uji *Adjusted R²* sebesar 36,6%. berarti bahwa kontribusi variabel dependen terhadap variabel independen hanya sebesar 36,6%. Dengan kata lain masih terdapat variabel lain yang memiliki kontribusi yang lebih besar lagi untuk ketepatanwaktuan pelaporan keuangan di pemerintah kota Padang.
- b. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

Saran

- a. Bagi peneliti selanjutnya, agar mengambil sampel yang lebih banyak dan menambah variabel-variabel penelitian lain dalam penelitian ini. Seperti akuntabilitas, komitmen pegawai, dan variabel lainnya.
- b. Bagi peneliti selanjutnya hendaklah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penelitian sehingga mencapai hasil yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Wiwik. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan . Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Volume 5 Nomor 1.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.2011. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2010*. Jakarta
- Dhany, Apriansyah 2010 Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah kota Bengkulu)
- Fadila, Ariesta. 2013. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*. BPFE, Yogyakarta.
- Indriasari, Desi. 2008. “ Pengaruh Kapasitas sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah”. *Simposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak.
- Jogiyanto. 2007. *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta : Andi.
- Jurnali, Teddy dan Bambang Supomo. 2002. “Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas, Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Kinerja Akuntan Publik”. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 5 No. 2
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mahmudi. 2007. *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat, dan Terakayasa*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Mahmudi, 2007. Manajemen kinerja sektor publik. Yogyakarta : UPP STIM
- Mustafa, Santiadji, Sutrisno dan Rosidi, 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari. Universitas Haluoleo,Kendari.
- Nazier, Daeng. 2009. “Kesiapan SDM Pemerintah Menuju Tata Kelola Keuangan Negara yang akuntabel dan transparan”. Jakarta: Kaditama Revbang BPK-RI.
- Pebriyani, Dewi. 2012. *Pengaruh pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Informasi Keuangan Daerah.
- Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan.

-----, Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah.

-----, Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah.

-----, Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.

-----, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Pemerintah Daerah Dengan Variabel
Intervening Pengendalian Intern
Akuntansi. Simposium Nasional Akuntansi
XIII

Pengawasan menurut Keputusan Presiden
No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata
Cara Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang keuangan Negara

Wahana Komputer. 2003. *Panduan
Aplikatif Sistem Akuntansi Online
Berbasis Komputer*. Penerbit
ANDI, Yogyakarta.

Warisno. 2009. Faktor- Faktor yang
mempengaruhi Kinerja Satuan
Kerja

Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Jambi. Tesis S-2
Universitas Sumatra Utara.

Primastuti, Anindita. 2008. Penilaian
terhadap pelaksanaan sistem
pengendalian intern pemerintah. FE
UI.

Putrining, Ayu. 2014. Pengaruh Sumber
Daya Manusia, Pemanfaatan
Teknologi Informasi, dan
Pengendalian Intern terhadap
Ketepatan Waktu Pelaporan
Keuangan Daerah. Jurnal
Universitas Surakarta.

Wijana, Nyoman. 2007. Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan
pengaruhnya pada kinerja
individual pada bank perkreditan
rakyat di kabupaten tabanan.
Jurnal. Universitas Udayana ; Bali.

Winidyaningrum, Celviana Rahmawati.
2010. Pengaruh Sumber Daya
Manusia Dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi Terhadap
Keterandalan Dan Ketepatan
Waktu Pelaporan Keuangan

Zetra, Aidinil. 2009. Strategi
Pengembangan *Kapasitas SDM*
Pemerintah Daerah dalam
Mewujudkan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Padangmedia.com

<http://www.borneonews.co.id/berita/14495-lkpd-2014-telat-lagi-diserahkan-ke-bpk>
(diakses 16 oktober 2016)

<http://jogja.tribunnews.com/2016/05/31/te-rlambat-laporkan-administrasi-keuangan-sleman-belum-terima-hasil-audit-bpk>

Lampiran

UJI VALID DAN RELIABILITAS

1. X1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.868	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	39.39	13.360	.513	.866
VAR00002	39.24	14.439	.527	.860
VAR00003	39.20	14.080	.563	.858
VAR00004	39.25	13.903	.630	.852
VAR00005	39.33	13.776	.647	.851
VAR00006	39.37	14.122	.609	.854
VAR00007	39.35	14.197	.623	.854
VAR00008	39.39	13.264	.675	.848
VAR00009	39.27	14.343	.540	.859
VAR00010	39.29	14.142	.577	.857

2. X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.861	15

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	60.46	23.098	.488	.854
VAR00002	60.22	23.518	.427	.857
VAR00003	60.25	23.451	.473	.854
VAR00004	60.37	22.186	.596	.848
VAR00005	60.41	21.812	.601	.847
VAR00006	60.40	21.955	.598	.848
VAR00007	60.28	23.098	.488	.854
VAR00008	60.33	22.669	.568	.850
VAR00009	60.32	23.130	.493	.853
VAR00010	60.48	23.116	.499	.853
VAR00011	60.28	24.394	.316	.861
VAR00012	60.37	23.196	.534	.852
VAR00013	60.33	23.197	.513	.852
VAR00014	60.34	23.363	.486	.854
VAR00015	60.28	23.722	.397	.858

3. X3

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.848	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	30.64	8.711	.426	.847
VAR00002	30.65	7.861	.667	.820
VAR00003	30.58	8.038	.605	.827
VAR00004	30.58	7.958	.633	.824
VAR00005	30.60	8.049	.649	.823
VAR00006	30.64	7.959	.630	.824
VAR00007	30.61	8.032	.614	.826
VAR00008	30.69	7.975	.483	.846

4. Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.691	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	8.99	.792	.548	.543
VAR00002	9.06	.796	.490	.621
VAR00003	8.94	.869	.482	.628

UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		126
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.99363185
Most Extreme Differences	Absolute	.059
	Positive	.031
	Negative	-.059
Kolmogorov-Smirnov Z		.665
Asymp. Sig. (2-tailed)		.769
a. Test distribution is Normal.		

UJI HETEROKEDASTISITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.207	.707		3.123	.002
	X1	-.006	.016	-.045	-.396	.692
	X2	-.023	.013	-.207	-1.784	.077
	X3	.011	.020	.061	.538	.591

a. Dependent Variable: RES2

UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.357	1.239		2.709	.008		
	X1	.005	.028	.017	.181	.856	.608	1.644
	X2	.062	.023	.251	2.694	.008	.586	1.706
	X3	.169	.036	.430	4.745	.000	.616	1.622

a. Dependent Variable: Y

UJI F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	76.087	3	25.362	25.072	.000 ^a
	Residual	123.413	122	1.012		
	Total	199.500	125			

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.618 ^a	.381	.366	1.006

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

UJI REGRESI BERGANDA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.357	1.239		2.709	.008
	X1	.005	.028	.017	.181	.856
	X2	.062	.023	.251	2.694	.008
	X3	.169	.036	.430	4.745	.000

a. Dependent Variable: Y

STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	126	32	50	43.67	4.122
X2	126	50	75	64.65	5.120
X3	126	22	40	35.00	3.212
Y	126	9	15	13.50	1.263
Valid N (listwise)	126				